



RANKIR P-RENJA **2024**

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

RANCANGAN

AKHIR

PERUBAHAN

RENJA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN SAMARINDA KOTA



TAHUN ANGGARAN

2024

KATA PENGANTAR


Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Renja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Samarinda Kota perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi yang baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi Kota Samarinda yaitu "***Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Peradaban***".

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang baik bagi penyempurnaan penyusunan Rankhir Perubahan Renja ini.

Samarinda, 2 September 2024

Camat Samarinda Kota


YOSUA LADEN, S.S.T.P., M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA REVIEW KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2023	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Review Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	32
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	36
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	36
3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	37
BAB IV : PENUTUP.....	58



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117

<http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> kecsamarindakota@gmail.com [f](#) [i](#) kecsamarindakota

SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA NOMOR : 800/46/400.03

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR P-RENJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2024 CAMAT SAMARINDA KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa sesuai Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2024, dan menetapkan dalam Keputusan Camat Samarinda Ulu Kota samarinda;

- d. bahwa nama / jabatannya tercantum pada lampiran keputusan dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan dalam Tim dimaksud.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - c. Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025
- l. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- n. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusun Rancangan Akhir P-Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024, mulai persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD, pelaksanaan forum SKPD dan penetapan Renja

- Perubahan SKPD ;
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Juni 2024

Camat Samarinda Kota

YOSUA LADEN, S.SSTP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Kota Nomor : 800/46/400.03/ Tentang Tim Penyusun
Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024

**TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2024**

Ketua:

Camat Samarinda Kota

Sekretaris :

Sekretaris Camat Samarinda Kota

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Koordinator

: Kasubag Perencanaan Program
dan Keuangan

Anggota

: Staf Sub Bagian Perencanaan
Program dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum

Koordinator

: Kasubag Umum dan Kepegawaian

Anggota

: Staf Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

II. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Koordinator

: Kasi Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Anggota

: Staf Seksi Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

III. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;

Koordinator

: Kasi Kebersihan dan Lingkungan
Hidup

Anggota

: Staf Seksi Kebersihan dan
Lingkungan Hidup

IV. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Koordinator

: Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Anggota

: Staf Seksi Ekonomi dan
Pembangunan

V. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban;

Koordinator

: Kasi Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban

Anggota

: Staf Seksi Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban

VI. Seksi Pelayanan Umum;
Koordinator
Anggota

: Kasi Pelayanan Umum
: Staf Seksi Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Juni 2024

Camat Samarinda Kota



YOSUA LADEN, S.SSTP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Samarinda Kota, melakukan penyusunan Rancangan Akhir P-Renja Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Samarinda Kota, Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 13) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- 21) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
- 22) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
- 23) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- 25) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;

- 26) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- 27) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 28) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 29) Keputusan Camat Samarinda Kota Nomor 800/25/400/03

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Samarinda Kota dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024;
- c. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
2. Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai Visi dan Misi Kota Samarinda dan tujuan Kecamatan Samarinda Kota;
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang bermanfaat, tepat

sasaran dan berkesinambungan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rankhir P-Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan tahunan terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA REVIEW KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Review SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Kota, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2024.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Samarinda Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Samarinda Kota, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Renja Kecamatan Samarinda Kota, pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024. Berkenaan tahun 2024 masih berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 terdapat perubahan nama program, kegiatan dan menambah sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan. Program baru tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dari ketiga program tersebut Kecamatan Samarinda Kota menerima anggaran sebesar Rp. 30.803.915.228 berdasarkan laporan realisasi keuangan triwulan II (E-monev TW II Kec.Samkot) sebesar 8.839.104.368 (28,70%). (akan dijelaskan pada lampiran terpisah dari pembahasan) untuk lebih jelasnya terkait capaian realisasi secara fisik Program/kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C 2.9 Sebagai berikut :

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kode					Usuran /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Output kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Samkot Tahun 2024)	Target Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 TW II	
									Realisasi Capaian dan Program Kegiatan s/d Tahun 2024 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01				Kecamatan Samarinda Kota					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	86.50	86.50	40.5	46.82 %
7	01	01	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72	72	35	48.61
7	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40
7	01	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

7	01	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
7	01	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Org/bln	65 Org/bln	65 Org/bln	100
7	01	01	2,0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

						ASN				
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	40
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-
7	01	01	2,0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-
7	01	01	2,0 5	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	3 Laporan	42.86
7	01	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100

						penggandaan yang disediakan				
7	01	01	2,0 6	08	Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
7	01	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan	2 Laporan	1 laporan	50
7	01	01	2,0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
7	01	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100
7	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50
7	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100

7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50
7	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100
7	01	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan dan perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
7	01	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	110 Unit	110 Unit	50 Unit	45.46
7	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	4 Unit	66.67
7	01	01	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	2 Unit	40
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	54.50	59.05
7	01	02	2,0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50

7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Bugis	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Karang Mumus	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pasar Pagi	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelabuhan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Sungai Pinang Luar	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50

7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.50 %	75.50 %	25 %	33.11
7	01	03	2,0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	165 Kegiatan	165 Kegiatan	30 Kegiatan	18.18
7	01	03	2,0 2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	28.57
7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	19 unit	19 unit	0	0
7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	29 Unit	2 Unit	6.9
7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 unit	14 unit	2 unit	14.29

7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	32 Unit	32 Unit	2 Unit	6.25
7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 unit	37 unit	7 Unit	18.92
7	01	03	2,0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100
7	01	03	2,0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	100
7	01	03	2,0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	100

7	01	03	2,0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	100
7	01	03	2,0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	100
7	01	03	2,0 2	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0
7	01	03	2,0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang dibina	165 Keluarga	165 Keluarga	40 Keluarga	24.24
7	01	03	2,0 6	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	165 Keluarga	165 Keluarga	40 Keluarga	24.24

7	01	03	2,0 6	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Bugis	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	19 Keluarga	19 Keluarga	4 Keluarga	21.05
7	01	03	2,0 6	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Pelabuhan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	32 Keluarga	32 Keluarga	8 Keluarga	25
7	01	03	2,0 6	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat kelurahan Pasar Pagi	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	14 Keluarga	14 Keluarga	4 Keluarga	28.57

7	01	03	2,0 6	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Karang Mumus	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	7 Keluarga	24.14
7	01	03	2,0 6	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	37 Keluarga	37 Keluarga	9 Keluarga	24.32

Dari tabel T.C 29 dapat dijelaskan untuk Pelaksanaan Program - program sesuai DPA RKA Kecamatan Samarinda Kota TA 2024 (tahun berjalan) secara kinerja (fisik) terlihat cukup baik progres fisiknya (59.32 %) karena lebih besar dari realisasi keuangannya sebesar (28,70%). Mengingat penyerapan anggaran tersebut dalam Triwulan II masih tergolong rendah yang berada di angka 28,70 %. Dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun ketiga Program unggulan Pemerintah Kota Samarinda Program Probebaya yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya yang tentunya harus banyak hal - hal teknis yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaannya agar menghindari masalah hukum dalam laporan pelaksanaan Probebaya di akhir tahun. Namun dengan gencarnya sosialisasi dan pematangan kegiatan dalam program unggulan Walikota yang tertuang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan maka dapat diyakinkan dalam pelaksanaan tiga bulan kedepan penyerapan anggaran untuk program tersebut dapat mencapai 75 % dari total pagu anggaran Probebaya, dan tentunya dalam tahun akhir 2024 dapat dipastikan mendekati 100 %

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp.30.803.915.228 yang dialokasikan dalam 3 Program, yang realisasinya dalam triwulan II sebesar 8.845.489.709 atau sekitar 28.70 % dari pagu anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yakni program Probebaya tentu banyak hal - hal yang harus dipersiapkan agar program unggulan tersebut berjalan lancar mulai dari sosialisasi ke masyarakat mengenai program unggulan tersebut, hal-hal teknis berupa aturan hukum dan pematangan rencana kerja masyarakat dalam program Probebaya.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara kelurahan-kelurahan dan SKPD Kota Samarinda masih mengalami hambatan.
3. Sebagian usulan program/kegiatan yang diusulkan tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA Kecamatan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional Kecamatan sebagai koordinator Kelurahan-kelurahan yang ada di bawah Kecamatan.
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai koordinator kelurahan-kelurahan tidak didukung penuh oleh SKPD pendukung, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan tidak merata disemua lini.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2022 Kecamatan Samarinda Kota, menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang peran serta masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan hijau;
2. Berkurangnya intensitas banjir dan kebakaran;

3. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi produktif;
5. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui konsep pelayanan prima;
6. Sosialisasi dan pengamalan terhadap peraturan pemerintah daerah;
7. Peningkatan koordinasi antar staf/instansi vertikal secara efektif dan efisien;
8. Mengusulkan aparatur mengikuti diklat baik struktur, teknis fungsional maupun peningkatan jenjang pendidikan formal;
9. Pembinaan pegawai secara berkualitas dan berkesinambungan;
10. Peningkatan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
11. Peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan dari bahaya banjir dan kebakaran;
12. Peningkatan kapasitas Lurah se-kecamatan Samarinda Kota tentang peran serta fungsi koordinasi dalam pembangunan;
13. Penegakan system reward dan punishment.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Kecamatan Samarinda Kota merupakan lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan. Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan Profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi local). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Samarinda Kota. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Samarinda Kota selaku lembaga teknis dibidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi dilapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, propinsi maupun

Kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan ditingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah propinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bias secara optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Samarinda Kota Sub Bag Perencanaan Program dan Keuangan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik ditingkat propinsi/kota dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, kecamatan merupakan unsur pelaksanaan teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kecamatan Samarinda Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

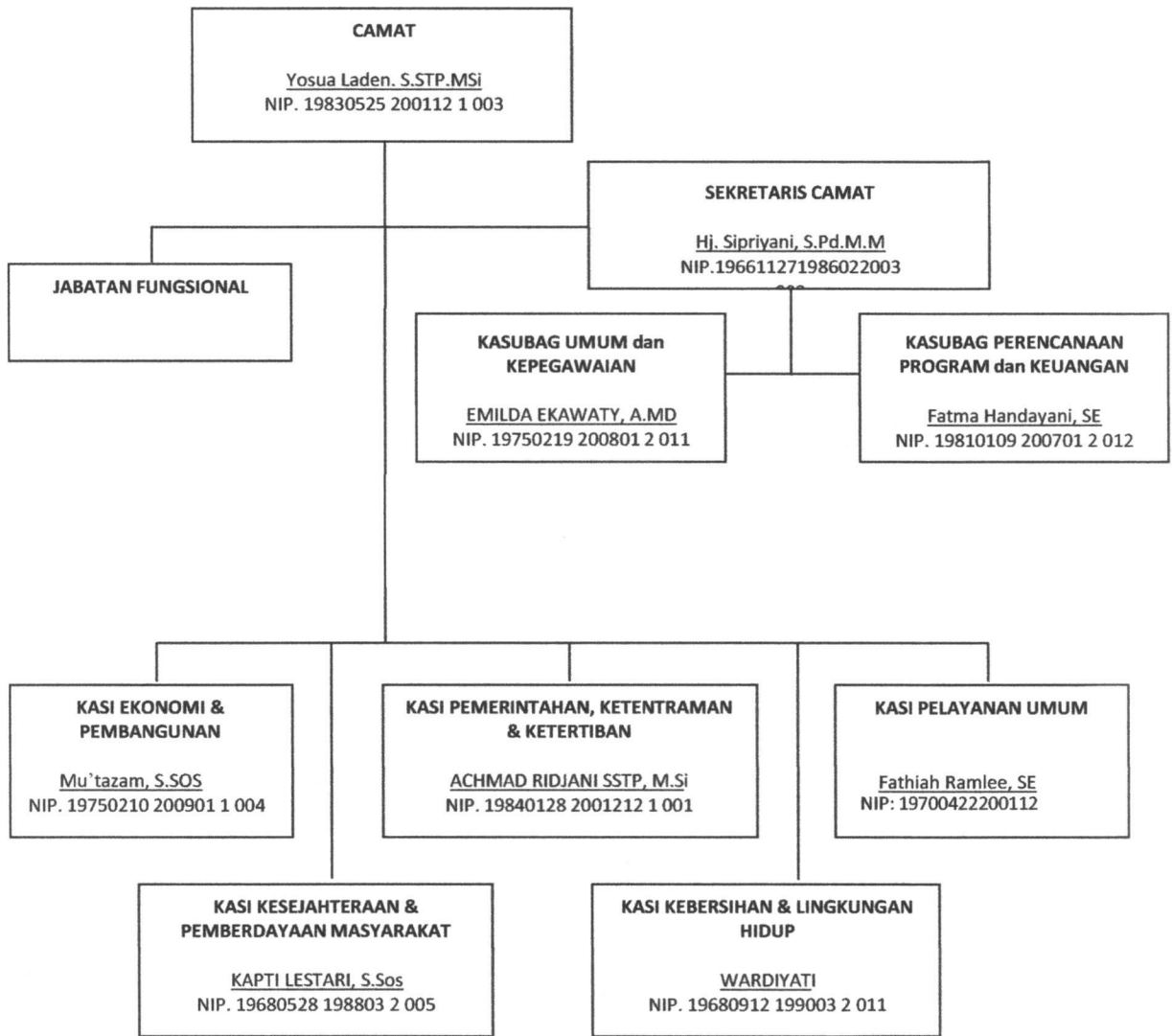
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara;

3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

B. Struktur Organisasi.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**



- Camat
- Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut Sekcam, terdiri atas :
 - Kasub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Pelayanan Umum
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Kelompok Jabatan Fungsional

C. Kajian Atas Indikator Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2011 – 2015, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Samarinda 2016 – 2021. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Lakip, Renstra, Profil dan Monografi serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi misi Kecamatan Samarinda Kota dalam RPJMD.
2. Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Samarinda Kota tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah Kota Samarinda. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang pelayanan dan Optimalisasi perlengkapan peralatan Tekhnologi Informatika yang memadai untuk memenuhi tantangan global dalam dunia pelayanan. Kemajuan Tekhnologi informatika tentunya juga harus diimbangi dengan Kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini bisa dapat kita lihat pada masa Negara kita memasuki masa pandemi Covid- 19 yang mana membuat aktivitas serba dibatasi dan yang lebih dikenal dengan istilah *Social Distancing* (Pembatasan Sosial). Hal tersebut pun langsung berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Di satu sisi kita langsung berhadapan hak dasar memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembuatan E-KTP, Surat Keterangan Nikah, KK dll. Di satu sisi juga kita menjaga keselamatan bersama (petugas pelayanan dan masyarakat) dari serangan virus covid -19. Maka diperlukan lah petugas pelayanan yang handal cakap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti pelayanan online. Pelayanan online bertumpu pada kemampuan memanfaatkan teknologi Informatika seperti menyediakan layanan berbasis digital, jadi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tinggal membuat surat permohonan via website serta membuat dokumen kelengkapannya berbasis digital. Dan masyarakat datang kekantor hanya mengambil hasilnya. Jadi tidak perlu lagi bolak-balik. Dan tentunya sangat efektif dan efisien. *Zoom meeting* merupakan teknologi terbaru dalam dunia digital (Next video Call), dimana dengan teknologi tersebut dapat menemukan orang banyak dalam satu media, atau media maya untuk berinteraksi satu sama lain,. teknologi digunakan untuk rapat jarak jauh, yang tentunya dalam memanfaatkannya perlu SDM yang handal.
2. Optimalisasi pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah kepada camat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti Kepastian Hukum yang jelas terkait pelimpahan wewenang kepada camat agar tidak

terjadi tumpang tindih dalam pelimpahan wewenang tersebut,. Siapa yang berwenang. Seperti seorang wirausaha untuk mendapatkan pinjaman kredit di Bank untuk keperluan usahanya apakah pengurusan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) hanya pada level camat apa pada level dinas yang terkait dan tentunya juga konsistensi peraturan pelimpahan tersebut.

3. Optimalisasi pembinaan kepada kelurahan dan kehidupan kemasyarakatan. karena kelurahan berada dibawah Kecamatan tentunya sinegritas dalam melayani masyarakat sangat diperlukan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud. Kelurahan yang baik dalam melayani masyarakat tentunya tidak terlepas dari pembinaan yang baik pula dari Kecamatan. baik pembinaan kepada SDM Kelurahan dan juga kepada masyarakat secara langsung, hal ini bisa dilihat dari pembinaan kecamatan Samarinda Kota Kepada SDM Kelurahan dengan melakukan Sidak (pengawasan Langsung) sekali dalam tiap bulannya. Pembinaan kepada masyarakat berupa pertemuan pertemuan tingkat RT contohnya saja dalam hal aturan membuang sampah.
4. Optimalisasi pembinaan pelaksanaan pembangunan dan tindak lanjut hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain. Hal ini bisa kita amati dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan sampai Kecamatan. Masyarakat yang hadir dalam musrenbang untuk menyampaikan aspirasinya tentang pembangunan disekitar lingkungannya tentu sangat berharap usulan pembangunan itu dapat terwujud tidak terhenti pada saat musrenbang saja tapi sampai pada tahap implementasi usulan tersebut. Hal ini tentunya sangat diperlukan peran serta Kecamatan dalam memonitor usulan tersebut ke Instansi yang terkait.

A. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Samarinda Kota pada dasarnya mengacu terhadap hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Kota pada awal Tahun 2024. Berkenaan Tahun 2024 masih berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renja pada Triwulan Kedua untuk Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Kecamatan Samarinda Kota dengan anggaran sebesar Rp.30.803.915.228 yang dialokasikan dalam 3 Program, yang realisasinya dalam triwulan II sebesar 8.839.104.368 atau sekitar 28,70 % dari pagu anggaran.

Dari Program Kegiatan serta sub kegiatan diketahui bahwa penyerapan anggaran masih dibawah 50% karena kegiatan tersebut dalam Triwulan Kedua pelaksanaan sehingga selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk Output pada Tahun 2024, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Samarinda Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan kemasyarakatan gabungan dari beberapa sub-sub kegiatan yang ada dimasyarakat dalam mendukung Visi Misi Kecamatan Samarinda Kota yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel. 2.2
Usulan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Usulan Pembangunan	Pagu Dana	Lokasi	Keterangan
1.	Kantor Kelurahan Karang Mumus	-	Jl. Mulawarman	Ruang kerja tidak memadai dan tidak menunjukkan ketenangan dalam memberikan Pelayanan.
2.	Kantor Kelurahan Bugis	-	Jl. Cempaka	Gedung kantor sudah lama tidak direnovasi, langit-langit sudah rusak dan hilang.
3.	Kantor Kelurahan Sungai Pinang Luar	-	Jl. Cut Mutia	Gedung kantor sudah lama tidak direnovasi, langit-langit sudah rusak dan hilang, kalau hujan lebat air hujan masuk kedalam gedung dikarenakan gedung berada dibawah badan jalan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas sasaran dan fungsi SKPD Kecamatan Samarinda Kota yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Samarinda Kota.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Samarinda Kota mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan Sosial dengan sasaran Terwujudnya Aparatur yang professional dalam penyelenggaraan pelayanan di kecamatan.

Kecamatan Samarinda Kota, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja Kecamatan Samarinda Kota mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun Misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 202-2026 yang Juga Merupakan Misi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah *"Terwujudnya Pelayanan Prima dengan didukung Aparatur yang Profesional dan Partisipasi Masyarakat yang mandiri"*.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tahun 2021-2016 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
3. Meningkatkan system pengelolaan penyediaan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
4. Mewujudkan system pengelolaan kepemilikan tanah tanpa menghadirkan konflik.

5. Mewujudkan rasa aman dan tertib bagi masyarakat dari gangguan kerawanan kejahatan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi dimasyarakat.
7. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Akhir P-RENJA Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- Peningkatkan kualitas pendidikan, kemampuan serta ketrampilan aparatur kecamatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas.

Sasaran :

- Terwujudnya aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.
- Terciptanya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas.

Tujuan :

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana penunjang kegiatan pelayanan.

Sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan yang baik.

Tujuan :

- Menyediakan data dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

Sasaran :

- Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari masing-masing kelurahan yang tersedia dikecamatan.

Tujuan :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kepemilikan lahan/tanah.

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas sengketa pertanahan.

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Sasaran :

- Meningkatnya keamanan lingkungan dari gangguan gepeng dan anak jalanan.
- Meningkatnya pengawasan terhadap PKL yang keberadaannya tidak pada peruntukannya.

Tujuan :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- Menciptakan iklim usaha yang produktif bagi pelaku UMKM.

Sasaran :

- Terwujudnya kualitas lingkungan yang hijau, bersih dan sehat.
- Berkembangnya kegiatan UMKM diwilayah Kecamatan Samarinda Kota

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pertumbuhan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional kecamatan Samarinda Kota adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Samarinda Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 terdapat perubahan nama program kegiatan dan menambah sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan.

Rencana Kerja adalah "Menjadikan Kecamatan Samarinda Kota, yang utama dalam pelayanan serta menuju pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang berwawasan lingkungan", maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Program ini terdiri dari 7 Kegiatan dan 22 sub kegiatan yang secara umum program ini bertujuan untuk Kelancaran operasional Kecamatan Samarinda Kota yang bersifat Rutin seperti Gaji PNS dan Non PNS, pembayaran tagihan Listrik, Komunikasi dan Tagihan Air, pembelian BBM, Pajak kendaraan serta perawatannya, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini bertujuan Wajib dilaksanakan oleh SKPD yang bersifat

pelayanan publik seperti Kecamatan Samarinda Kota untuk melayani keperluan publik seperti penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain. Dan tentunya program ini untuk mengukur dalam kepuasan masyarakat (IKM)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang bernama Program Probebaya merupakan program unggulan Kota Samarinda yang sudah diintegrasikan dalam RPJMD 2021-2026 berupa pemberdayaan RT alokasi 100 juta/RT setiap tahun dan pengembangan badan usaha milik RT (Berbasis Kelurahan). Program ini bertujuan untuk membangun Wilayah Kelurahan baik itu fisik dan non fisik berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang guna mewujudkan Kota Samarinda sebagai Pusat Kota Peradaban sesuai Visi dan Misi Kota Samarinda.

Dalam tabel 3.1 terkait Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 (Tahun Berjalan) dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dijelaskan mengenai proses penetapan pagu anggaran Kecamatan Samarinda Kota tahun 2024 dan Prakiraan Tahun maju Tahun 2025 yang terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. (RKPD).

Penetapan Pagu anggaran Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 Rp. 30.803.915.228 yang terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan yang merupakan hasil analisis kebutuhan yang telah ditetapkan oleh TAPD. Dan untuk prakiraan maju tahun 2025 Kecamatan Samarinda Kota Mengusulkan Pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 30.849.554.050 yang terdiri dari 3 Program, 10 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan. Terkait usulan dalam RKPD Kecamatan Samarinda Kota tahun 2025 yang berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang berpedoman pada kemampuan APBD Kota Samarinda tahun 2025, maka ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda tahun 2025 yang bisa saja dalam Renja tersebut tidak semua usulan dalam RKPD dipenuhi semua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2024 (Tahun Berjalan) dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										(1)	(2)	(3)
7												
7	01											
7	01	01										
7	01	01	2,01									
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Dokumen	75.000.000	APBD Kota Samarinda	5 Dokumen	79.500.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda	1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda	1 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	APBD Kota Samarinda		1 Laporan	53.000.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda kota, Semua Kelurahan	4 Laporan	25.000.000	APBD Kota Samarinda		4 Laporan	26.500.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kecamatan Samarinda Kota	12 Laporan	10.666.296.000	APBD Kota Samarinda		7 Laporan	11.031.781.800
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	65 Org/bln	9.214.378.000	APBD Kota Samarinda		65 Org/bln	9.865.859.371
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	37 Dokumen	1.401.918.000	APBD Kota Samarinda		37 Dokumen	1.112.922.429

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Laporan	50.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Laporan	53.000.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	-		0	0
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0	0	-		0	0
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0	0	-		0	0
7	01	01	2,05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	0	0	-		0	0
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kecamatan Samarinda Kota	7 Laporan	515.154.000	APBD Kota Samarinda		19 Laporan	546.063.240
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Paket	16.380.000	APBD Kota Samarinda		2 Paket	17.362.800
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Paket	350.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Paket	371.000.000
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Paket	4.774.000	APBD Kota Samarinda		5 Paket	5.060.440
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Paket	19.000.000	APBD Kota Samarinda		4 Paket	20.140.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	01	2,06	08	Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	12.000.000	APBD Kota Samarinda		12Laporan	12.720.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	113.000.000	APBD Kota Samarinda		6 Laporan	119.780.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	Kecamatan Samarinda Kota	2 Laporan	941.469.556	APBD Kota Samarinda		8 Unit	997.957.729
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Unit	275.324.501	APBD Kota Samarinda		1 Unit	291.843.971
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Unit	482.345.055	APBD Kota Samarinda		5 Unit	511.285.758
7	01	01	2,07	05	Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Unit	183.800.000	APBD Kota Samarinda		2 Unit	194.828.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kecamatan Samarinda Kota	12 Laporan	194.108.672	APBD Kota Samarinda		156 Laporan	242.718.800
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	174.108.672	APBD Kota Samarinda		144 Laporan	221.518.800
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.000.000	APBD Kota Samarinda		12 Laporan	21.200.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Kecamatan Samarinda Kota	12 Laporan	519.108.000	APBD Kota Samarinda		29 Laporan	531.174.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	18 Unit	99.254.000	APBD Kota Samarinda		18 Unit	86.129.240
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan dan perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Unit	31.754.000	APBD Kota Samarinda		1 Unit	33.659.240
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	110 Unit	25.000.000	APBD Kota Samarinda		110 Unit	26.500.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	6 Unit	357.200.000	APBD Kota Samarinda		6 Unit	378.632.000
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Unit	5.900.000	APBD Kota Samarinda		5 Unit	6.254.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Kota	92,30	2.978.060.000	APBD Kota Samarinda		92,5	1.643.000.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kecamatan Samarinda Kota	12 Dokumen	2.978.060.000	APBD Kota Samarinda		12 Dokumen	1.643.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Kec.Samarinda Kota,	2 Dokumen	1.538.060.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	848.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Dokumen	258.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	159.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	2 Dokumen	258.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	159.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	2 Dokumen	258.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	159.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	2 Dokumen	258.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	159.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Dokumen	408.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	159.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	32 Unit	1.801.500.000	APBD Kota Samarinda		25 Unit	1.909.590.000
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	37 unit	2.641.500.000	APBD Kota Samarinda		37 Unit	2.799.990.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Pokmas/Ormas	845.699.000	APBD Kota Samarinda		2 Pokmas/Ormas	892.096.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	3 Pokmas/Ormas	1.275.756.400	APBD Kota Samarinda		3 Pokmas/Ormas	1.345.670.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda kota Pasar Pagi,	1 Pokmas/Ormas	636.777.700	APBD Kota Samarinda		1 Pokmas/Ormas	669.496.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	3 Pokmas/Ormas	1.108.403.600	APBD Kota Samarinda		2 Pokmas/Ormas	1.167.590.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3 Pokmas/Ormas	1.613.482.300	APBD Kota Samarinda		3 Pokmas/Ormas	1.701.830.000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	5 Laporan	50.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Laporan	53.000.000
7	01	03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang dibina	Kota Samarinda, Samarinda Kota	165 Keluarga	350.000.000	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	371.000.000
7	01	03	2,06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota	165 Keluarga	100.000.000	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	106.000.000
7	01	03	2,06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda kota, Bugis	19 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		19 Keluarga	53.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024 (Tahun Berjalan Triwulan II)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2,06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota , Pelabuhan	32 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		25 Keluarga	53.000.000
7	01	03	2,06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Pasar Pagi	14 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		14 Keluarga	53.000.000
7	01	03	2,06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Karang Mumus	29 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		29 Keluarga	53.000.000
7	01	03	2,06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	37 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		37 Keluarga	53.000.000

Tabel 3.1.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Sebelumnya

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Kota

Kode	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2022 (tahun yang lalu/n-2)			Target Progra m/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/4)	12
1	Unsur Kewilayahan										
7	01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Outcome : Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,75	78	85,5	84	98,25	85,75	40,75	47,53
7	01 02 2 01	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Output : Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	5Dokumen	95.64 persen	5 Koordinasi	5 Koordinasi	100	5 Dokumen	5.5	30.55 %
7	01 02 2 01 02	a)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50

						b)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bugis	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
						c)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Karang Mumus	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
						d)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pasar Pagi	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
						e)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pelabuhan	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
						f) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Outcome : Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76 Persen	72 persen	100	100	100	75,25 %	33	43,85 %	

7	01	03	2	02		1)Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	321 Unit/Pokmas	1590 Usulan Kefiatan	1590 Usulan Kefiatan	1870 Usulan Kegiatan	96,58	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	43,85 %
7	01	03	2	02	01	a)Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	14 Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	02	02	a)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	19Unit	100 persen	-	-	100	19 Unit	10	52,63 %
						b)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	100 persen	-	-	100	29 RT	16	55,67 %
						c)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	100 persen	-	-	100	14 RT	11	45,83 %
						d)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	32 Unit	100 persen	-	-	100	32 RT	13	40,63 %
						e)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	37 Unit	100 persen	-	-	100	37 RT	8	21,62 %

7	01	03	2	02	03	i)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	2 Pokmas / Ormas	1	50 %
						j)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	3 Pokmas / Ormas	1	33,33 %
						k)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	1 Pokmas / Ormas	1	100 %
						l)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	3 Pokmas / Ormas	1	33,33 %
						m)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	3 Pokmas / Ormas	1	33,33 %
7	01	03	2	02	04	q)Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Output : Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	06		l)Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Output : Jumlah Keluarga Yang dibina	- Keluarga	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	06	02	a)Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Smd Kota)	Output :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	141 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-

7	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang	100 persen	65 orang	65 orang	100 %		
7	01	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	100 %	
7	01	01	2	02	05	b)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 Laporan	2 laporan	40 %		
7	01	01	2	05		3)Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang		
7	01	01	2	05	02	a)Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	103 orang	103 orang	100%		
7	01	01	2	05	09	b)Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	18 Orang	6 Orang	33,33		
7	01	01	2	05	11	c)Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2	06		4)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	13 Laporan	100 %		

7	01	01	2	06	01	a)Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	1 Paket	50 %	
7	01	01	2	06	02	b)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 %	
7	01	01	2	06	03	c)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output :Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	06	04	d)Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output :Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 Persen	5 Paket	2 Paket	40 %	
7	01	01	2	06	05	e)Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	2.5	62,5 %	
7	01	01	2	06	06	f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	06	08	g)Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	
7	01	01	2	06	09	h)Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	5.5 Laporan	91.67 %	

7	01	01	2	07		5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Output : Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %		
7	01	01	2	07	01	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%		
7	01	01	2	07	02	b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %		
7	01	01	2	07	05	c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Output : Jumlah PAKet Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50 %		
7	01	01	2	07	06	d) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	07	10	e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	07	11	f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor bangunan lainnya	Output : Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7	01	01	2	08		6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	228 laporan	228 laporan	228 laporan	228 laporan	228 laporan	228 laporan	60 laporan	100 %
7	01	01	2	08	02	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Bukti pembayaran	216 Bukti pembayaran	216 Bukti pembayaran	216 Bukti pembayaran	100 %	216 Bukti pembayaran	100 Bukti pembayaran	46,3 %
7	01	01	2	08	03	b)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	08	04	c)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bukti pembayaran	12 Bukti pembayaran	12 Bukti pembayaran	12 Bukti pembayaran	100 %	12 Bukti pembayaran	6 Buktipembayaran	50 %
7	01	01	2	09		7)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	26 laporan	26 laporan	29 Laporan	26 Laporan	89,66 %	29 Laporan	18	50,5 @
7	01	01	2	09	01	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	12 Unit	18 Unit	12 Unit	66,67	18 Unit	13 unit	35,5 %
7	01	01	2	09	02	b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-

7	01	01	2	09	06	c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	110 Unit	60 Unit	54.55 %		
7	01	01	2	09	09	d)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 Persen	6 Unit	3,5 Unit	58,33	
7	01	01	2	09	10	e)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	40 %	

Kecamatan Samarinda Kota telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 terkait perubahan nilai pagu anggaran yang terdapat di masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Berikut Perubahan yang dilakukan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
Wilayah Kecamatan Samarinda Kota						
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.214.378.000,00	9.517.726.353,00	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi untuk pembayaran sampai akhir tahun 2024
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.324.501,00	192.900.000,00	Rasionalisasi Anggaran
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.254.000,00	115.754.000,00	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sampai akhir tahun 2024 terutama untuk BBM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.754.000,00	15.254.000,00	Anggaran berkurang karena digeser di sub kegiatan lain (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.538.060.000,00	1.443.759.101,00	Rasionalisasi Anggaran

3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	20.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran
Wilayah Kelurahan Karang Mumus						
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan Karang Mumus	258.000.000,00	238.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran
Wilayah Kelurahan Pelabuhan						
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan Pelabuhan	258.000.000,00	238.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran
Wilayah Kelurahan Pasar Pagi						
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan Pasar Pagi	258.000.000,00	238.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran
Wilayah Kelurahan Bugis						
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan Bugis	258.000.000,00	238.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran
Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar						
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan Sungai Pinang Luar	408.000.000,00	388.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir P-Renja 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya mengarah kebawah (Trickle Down Effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar diutamakan.

Rancangan Akhir P-Renja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Kota. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Kota. Rancangan Akhir P-Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah-lurah serta seluruh staf Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Rencana Kerja ini dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia atau Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik antara bidang, peran pimpinan dalam mengambil keputusan serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi kepada Instansi Pemerintahan yang ada di Kota Samarinda.

				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Pasar Pagi	131	8,773,063,741	1,023,600,000	PAD	18990000	16,990,000	8,790,053,741	14.29	1.66				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		14 Unit						14.29					
				Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan tercapai karena semua pihak terlibat aktif					PAD	1023600000							
				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pasar Pagi	12	5,224,542,968	636,777,700	PAD	42000000	42,000,000	5,266,542,968	100	6.6				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas						100					
				Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan tercapai karena semua pihak terlibat aktif					PAD	636777700							
				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Bugis	131	8,773,063,741	1,381,500,000	PAD			8,773,063,741						
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		19 Unit											
				Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Tidak tercapai karena KPA masih dalam proses peralihan, dan Kondisi Lurah sedang sakit (Stroke)					PAD	1381500000							
				Faktor Pendukung T2 :		Kegiatan Tidak tercapai karena KPA masih dalam proses peralihan, dan Kondisi Lurah sedang sakit (Stroke)													
				Faktor Penghambat T2 :		KPA masih dalam proses peralihan, dan Kondisi Lurah sedang sakit (Stroke)													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Bugis	12	5,224,542,968	845,699,000	PAD	19000000	57,000,000	5,281,542,968	100	6.74				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas						100					
				Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan tercapai karena semua pihak terlibat aktif					PAD	845699000							
				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Pinang Luar	131	8,773,063,741	2,641,500,000	PAD			8,773,063,741	18.92					
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		37 Unit						18.92					
				Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan tercapai tetapi realisasi keuangan masih dalam proses pengajuan SP2D					PAD	2641500000							
				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Pinang Luar	12	5,224,542,968	1,613,482,300	PAD	118704924	118,704,924	5,343,247,892	100	7.36				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.02	2	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas						100					
				Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan tercapai karena semua pihak terlibat aktif					PAD	1613482300							
				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
				Rata-rata capaian kinerja (%)										47.91	9.25				
				Predikat Kinerja										SR	SR				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.06	2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			350,000,000		47,577,466	66,080,372	66,080,372	24.24	19.45				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.06		Jumlah Keluarga Yang di Bina		165 Keluarga			40	40		24.24					
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			100,000,000	PAD	12227466	17,710,372	17,710,372	24.24	17.71				
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		165 Keluarga			40	40		24.24					
				Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan tercapai karena semua pihak yang terlibat aktif					PAD	100000000							
				Faktor Pendukung T2 :		karena semua pihak yang terlibat aktif													
				Faktor Penghambat T2 :		tidak ada													
7.01.0.00.0.00.09.000	0	7	1	3.2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Karang Mumus			50,000,000	PAD	15300000	15,300,000	15,300,000	24.14	30.6				

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	19,689,675		50,000,000	PAD		4765000	5,325,000	25,014,675	100	10.65
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	Laporan							100
Uraian/Keterangan T2 : tercapai tetapi realisasi keuangan masih dalam proses pengajuan SP2D																	
Faktor Pendukung T2 : karena semua pihak terlibat aktif																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	17,256,200		25,000,000	PAD		1904700	3,339,700	20,595,900	50	13.36
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4	Laporan							50
Uraian/Keterangan T2 : tercapai karena semua pihak ikut terlibat																	
Faktor Pendukung T2 : tercapai karena semua pihak ikut terlibat																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat Kinerja																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,360,265,577		10,666,296,000			3,184,379,044	5,548,598,244	14,908,863,621	50	52.02
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02		Jumlah laporan				12	Laporan							50
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		65	8,333,218,894		9,214,376,000	PAD		2688638836	4,731,138,039	13,064,356,933	100	51.35
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85	Orang/bulan			85	85			100
Uraian/Keterangan T2 : target tercapai karena sudah sesuai dengan perkiraan																	
Faktor Pendukung T2 : target tercapai karena sudah sesuai dengan perkiraan																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		37	1,006,583,608		1,401,918,000	PAD		493514206	815,234,205	1,823,817,813	100	58.15
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1	Dokumen							100
Uraian/Keterangan T2 : karena semua pihak terlibat aktif dalam prosesnya																	
Faktor Pendukung T2 : semua pihak terlibat aktif																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5	18,463,075		50,000,000	PAD		2226000	2,226,000	20,689,075	40	4.45
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	Laporan							40
Uraian/Keterangan T2 : tercapai tetapi realisasi keuangan masih dalam proses pengajuan SP2D																	
Faktor Pendukung T2 : semua pihak terlibat aktif dalam prosesnya																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat Kinerja																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			743,331,452		515,154,000			42,074,041	45,121,616	788,453,268	42.86	8.76
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06		Jumlah laporan				7	Laporan							42.86
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	15,108,700		16,380,000	PAD		1155000	1,155,000	16,263,700	100	7.05
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	Paket							100
Uraian/Keterangan T2 : karena sudah sesuai dengan perkiraan																	
Faktor Pendukung T2 : Karena semua pihak terlibat aktif																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	388,722,000		350,000,000	PAD				388,722,000	100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1	Paket							100
Uraian/Keterangan T2 : kegiatan masih dalam proses																	
Faktor Pendukung T2 : semua pihak terlibat aktif																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3	12,365,000		4,774,000	PAD				12,365,000	100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	Paket							100
Uraian/Keterangan T2 : kegiatan masih dalam proses																	
Faktor Pendukung T2 : semua pihak terlibat aktif																	
Faktor Penghambat T2 : tidak ada																	

		Faktor Pendukung T2 :			semua pihak terlibat aktif								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4 14,854,335	19,000,000	PAD	1697836	4,745,611	19,599,946	100	24.98
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket						100	
		Uraian/Keterangan T2 :			tercapai dan sesuai dengan SOP								
		Faktor Pendukung T2 :			semua pihak aktif terlibat								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 9,960,000	12,000,000	PAD	960000	960	10,920,000	100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	8	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan						100	
		Uraian/Keterangan T2 :			tercapai dan sudah sesuai dengan perkiraan SOP								
		Faktor Pendukung T2 :			semua pihak aktif terlibat								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 302,321,417	113,000,000	PAD	38261205	38,261,205	340,562,622	100	33.86
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.06	8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan						100	
		Uraian/Keterangan T2 :			tercapai dan sudah sesuai dengan perkiraan SOP								
		Faktor Pendukung T2 :			semua pihak terlibat aktif								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	8.78
Predikat Kinerja												ST	SR
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199,028,228	941,469,556		667,340,000	694,070,000	893,098,228	50	73.72
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	1	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan						50	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		275,324,501	PAD	192660000	192,660,000	192,660,000	100	69.98
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit						100	
		Uraian/Keterangan T2 :			tercapai dan kegiatan masih dalam proses								
		Faktor Pendukung T2 :			semua pihak aktif terlibat								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 23,105,228	482,345,055	PAD	438160000	438,160,000	461,285,228	200	90.64
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit				10		200	
		Uraian/Keterangan T2 :			tercapai dan sudah sesuai dengan SOP								
		Faktor Pendukung T2 :			sudah sesuai dengan SOP								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	5	Pengadaan Mebel	2 175,923,000	183,800,000	PAD	36500000	63,230,000	239,153,000	50	34.4
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit						50	
		Uraian/Keterangan T2 :			tercapai dan masih dalam proses kegiatan								
		Faktor Pendukung T2 :			sesuai dengan kebutuhan dan anggaran								
		Faktor Penghambat T2 :			tidak ada								
Rata-rata capaian kinerja (%)												116.67	73.72
Predikat Kinerja												ST	S
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,181,387	194,108,672		42,684,111	88,473,189	296,654,676	50	45.66
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	12.08	1	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan						50	

7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		215,175,681,387		174,108,672	PAD	42684111	88,473,189	264,154,576		100	50.82
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1	Laporan					100	
Uraian/Keterangan T2 :					jasa komunikasi (internet) di ambil alih diskominfo, listrik air masih menggunakan anggaran rutin											
Faktor Pendukung T2 :					semua pihak ikut terlibat aktif											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12,325,000,000		20,000,000	PAD			32,500,000		100	
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1	Laporan					100	
Uraian/Keterangan T2 :					tercapai dan sudah sesuai SOP											
Faktor Pendukung T2 :					semua pihak ikut terlibat aktif											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	45.58
Predikat Kinerja															ST	SR
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		442,322,266		519,108,000		152,823,139	154,876,184	597,198,450		50	29.84
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	1	Laporan Pemeliharaan						5	6			50	
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6,804,201,194		99,254,000	PAD	30189081	32,242,126	112,662,320		200	32.48
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						16	36			200	
Uraian/Keterangan T2 :					tercapai dan sudah sesuai dengan perkiraan											
Faktor Pendukung T2 :					sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31,754,000	PAD					100	
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya						1				100	
Uraian/Keterangan T2 :					tercapai dan masih dalam proses pengajuan SP2D											
Faktor Pendukung T2 :					sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		70,627,000		25,000,000	PAD	7310506	7,310,508	13,580,508		45.48	29.24
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						40	50			45.48	
Uraian/Keterangan T2 :					tercapai dan sudah sesuai dengan perkiraan											
Faktor Pendukung T2 :					sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6,349,732,072		357,200,000	PAD	110323500	110,323,550	480,055,622		86.67	30.69
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2	4			86.67	
Uraian/Keterangan T2 :					tercapai dan masih dalam proses kegiatan											
Faktor Pendukung T2 :					semua pihak aktif terlibat											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5,900,000		5,900,000	PAD	5000000	5,000,000	10,900,000		40	84.75
7.01.0.00.0.00.09.000 0	7	1	12.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	2			40	
Uraian/Keterangan T2 :					tercapai dan masih dalam proses kegiatan											
Faktor Pendukung T2 :					semua pihak terlibat aktif											
Faktor Penghambat T2 :					tidak ada											
Rata-rata capaian kinerja (%)															90.43	29.84
Predikat Kinerja															T	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)															91.74	50.36
Predikat Kinerja															ST	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							C 5,793,909,716	8,839,104,368								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															59.32	28.7

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

R SR

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :